

EDISI : *Kelip 16 Oktober 2019*

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI :Rabu, 16 Oktober 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Pemkab Buleleng Cegah Penyalahgunaan Medsos Pada ASN	Penyalahgunaan Media Sosial di kalangan Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat umum semakin marak, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Buleleng, menyiapkan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan manfaat medsos pada ASN serta seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diungkapkan kepala Diskominfosandi Kabupaten Buleleng I Ketut Suweca yang ditemui usai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota pengantar Bupati atas beberapa rancangan pengaturan daerah.	
2	POS BALI	Ratusan Warga Bungkulan Ngelurug Kantor BPN Buleleng	Ratusan warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ngelurug Kantor Badan Pertanahan Nasional Buleleng, Selasa (15/10). Kedatangan mereka untuk menanyakan tindak lanjut atas kasus penyerobotan lahan lapangan sepak bola dan puskesmas pembantu I Desa Bungkulan, yang disertifikatkan perseorangan oleh Kusuma Ardana sejak tahun 2013 lalu. Rombongan warga ini dipimpin oleh Klian Banjar Adat Punduh Lo Desa Bungkulan, Putu KembarBunda bersama tokoh masyarakat Desa Bungkulan, Ketut Sumardana.	
		BUMDes Patas Bermasalah, Ditemukan Kredit macet Rp821 Juta	Kondisi pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Masyarakat Desa Patas, sangat memprihatinkan. Berbagai persoalan terjadi pada BUMDes yang beriri tahun 2010 dan mulai berjalan tahun 2012 silam ini. Hal itu	

			<p>terungkap saat digelar Musyawarah Desa Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Buleleng pada Selasa (15/10) di Gor Amatha Yudha Desa Patas. Dalam musdes tersebut dibahas soal pelaporan tim penyehatan BUMDes Amatha dan tinjauan operasional BUMDes, melibatkan anggota BPD Desa Patas, aparat Desa, Perbekel Patas.</p>
		<p>Polres Buleleng Bekuk Empat Pelaku Narkoba</p>	<p>Saat asyik berada di areal peternakan ayam aduan, Made Beni Ariawan alias Cak Lole (35) warga Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng, dibekuk jajaran Satres Narkoba Polres Buleleng, pada Minggu (6/10) lalu sekitar pukul 16,00 wita. Penangkapan Cok Lole berkat pengembangan dari penangkapan pelaku narkoba sebelumnya. Berdasarkan informasi yang diterima, penangkapan Cok Lole yang diduga sebagai pengedar dimulai dari ditangkapnya Putu Susila alias Cepot (47) sekitar pukul 15.30 wita di pinggir jalan Desa Bengkel-Banyuatis.</p>



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Nusa Bali

Kategori : BPN

Sertifikat Lapangan Bungkulan Cacat Administrasi

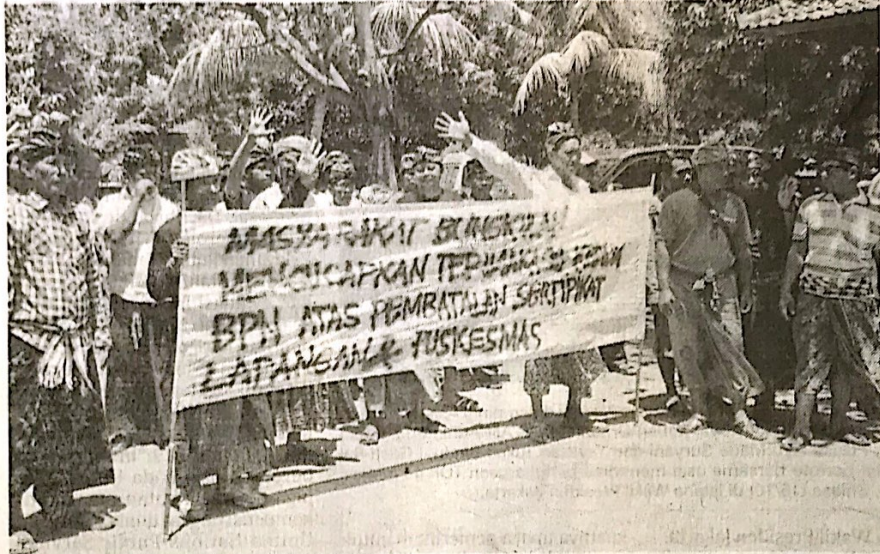
Warga Pertanyakan Pembatalan ke BPN

SINGARAJA, NusaBali

Sengketa tanah Lapangan Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng, memasuki babak baru. Sertifikat hak milik atas nama Perbekel Bungkulan non aktif, Ketut Kusuma Ardana, diduga cacat administrasi.

Sertifikat itu pun terancam dicabut oleh Kanwil Badan Pertanahan Negara (BPN) Bali. Perkembangan sengketa tanah lapangan Bungkulan itu muncul, ketika puluhan warga Desa Bungkulan, kembali mendatangi Kantor BPN Buleleng, di Jalan Dewi Sartika Singaraja, Selasa (15/10) pagi. Sengketa muncul, ketika tanah Lapangan Bungkulan termasuk lahan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada di sisi barat Lapangan Bungkulan, disertifikatkan oleh Perbekel non aktif Kusuma Ardana, melalui Prona tahun 2013. Warga keberatan karena tanah Lapangan Bungkulan dan lahan Pustu itu dianggap fasilitas milik desa yang telah dimanfaatkan puluhan tahun silam.

Puluhan warga Bungkulan dengan busana adat madya, datang ke kantor BPN melalui pintu belakang. Sambil berorasi, warga membentangkan spanduk bertuliskan "Masyarakat Bungkulan mengucapkan teri-



• NUSABALI/LILIK

WARGA Desa Bungkulan, Buleleng, bentangkan spanduk di depan pintu masuk Kantor BPN Buleleng

makasih kepada BPN atas pembatalan sertifikat Lapangan dan Puskesmas". Pihak BPN hanya mengizinkan beberapa perwakilan warga masuk menemui Kepala BPN Buleleng. Pertemuan pun berlangsung tertutup di ruang kerja Kepala BPN.

Usai pertemuan, Koordinator warga I Putu Kembar Budana mengungkapkan, pihaknya tetap yakin proses penerbitan sertifikat tanah lapangan dan lahan Pustu tidak sesuai prosedur. Proses itu penuh dengan kejanggalan menyangkut pemberian dukungan

dan penyanggah.

Menurut Budana, nama-nama yang disebutkan permohonan justru tidak pernah mengetahui permohonan tersebut. Sehingga mereka mencabut dukungan dan persetujuan yang telah diberikan. Salah satunya disebutkan adalah

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *Sambungan*



• NUSABALI/LULIK

Bendesa Adat Bungkulan, Made Mahawerdi telah mencabut dukungannya. Selain itu, Made Sumardika yang tercantum sebagai penyanding, justru ditulis Made Goloh yang tidak lain adalah nama panggilannya sehari-hari. Begitu pula dengan penyanding lainnya yakni Nyoman Seni, yang dalam surat justru tertulis Luh Seni. Keduanya mengaku tidak tahu-menahu soal pengukuran lahan tersebut, hingga kemudian juga mencabut dukungan.

Masih kata Budiana, kejanggalan lain adalah lahan tersebut berlokasi di Banjar Dinas Dauh Munduk, namun justru yang

menandatangani dukungan adalah Kelian Banjar Dinas Badung almarhum Ketut Wirasanjaya. "Kalau bukti masyarakat tidak punya, tapi secara de facto sejak dulu tanah itu sudah digunakan sebagai fasilitas umum. Dari pihak yang lain juga tidak punya bukti apa-apa, tapi yang kami pertanyakan, kok bisa terbit sertifikat pada 2013 atas nama pribadi, itu yang kami sesalkan," tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPN Buleleng Made Sudarma mengaku telah meneliti data fisik dan yuridis, permohonan sertifikat tanah lapangan dan Pustu Bungkulan bersama

Kanwil Pertanahan Bali. Penelitian tersebut telah dituangkan dalam analisa terhadap proses penerbitan sertifikat. Hasilnya, diakui ada cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat lewat Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2013, dimana ada beberapa alas hak untuk proses penerbitan sertifikat itu, yang saksinya menarik tanda tangan, termasuk mencabut dukungan. "Analisis kami kirim ke Provinsi (Kanwil, Red) untuk ditindaklanjuti dengan melaksanakan gelar, kemudian dibahas dan menghasilkan keputusan untuk pembatalan seperti apa, tapi yang kami usulkan karena cacat administrasi," jelasnya.

Menurut Sudarma, kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat seperti yang terjadi dalam persoalan di Desa Bungkulan, karena kantor Pertanahan Buleleng tidak memiliki kewenangan menguji materi permohonan. "Itu kewenangan Kepolisian, apakah itu suratnya benar atau salah. BPN hanya kebenaran formal, artinya berdasarkan surat, kalau suratnya sudah memenuhi persyaratan kita proses. Nanti kalau bisa dibuktikan sebaliknya itu bisa dinyatakan cacat," ujarnya. **k19**

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Narkoba*

Empat Penyalah Guna Narkoba Dikeler

★ Satu Pengedar Sembunyikan Narkoba di Gelebeg

SINGARAJA, NusaBali

Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng kembali mengamankan empat penyalahguna narkoba dalam kurun waktu dua hari. Seorang di antaranya ditetapkan sebagai pengedar narkoba jenis sabhu-sabhu. Polisi pun masih mendalami siapa bandar penyuplai barang terlarang kepada pelaku.

Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba itu berawal dari penangkapan Putu Susila alias Cepot,47, warga Banjar Dinas Dauh Pangkung, Kecamatan Busungbiu, Buleleng pada Minggu (6/10) pukul 15.30 Wita. Cepot *dijuk* (ditangkap) Satresnarkoba Polres Buleleng saat berada di pinggir jalan Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Buleleng, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan satu paket sabhu-sabhu seberat 0,18 gram yang sempat dibuang oleh pelaku.

Kasat Narkoba Polres Buleleng, AKPI Made Derawi, Selasa (15/10), mengatakan dari hasil penyelidikan, pelaku Cepot membeli barang terlarang itu dari Made Beni Ariawan alias Cak Lole,35, warga Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar Buleleng. Selang

setengah jam, tim Satnarkoba Polres Buleleng langsung melakukan penggrebekan di rumah Cak Lole.

Saat dilakukan pengeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa lakban, plastik plip, pipet plastik dan alat hisap yang disimpan di dalam gelebeg (lumbung padi,red) di lingkungan peternakan ayam jago di samping rumahnya. "Kita sudah gali betul secara intensif kepada pengedar. Dia mengaku mendapatkan barang tempelan diperoleh dari seseorang yang sampai saat ini tidak diketahui siapa dan darimana asal barang. Masih terus kami dalami, kedepannya agar berhasil mengungkap sindikat mereka," ujar Kasat Narkoba AKPI Made Derawi.

Selain mengamankan dua pelaku di wilayah Buleleng Barat, Satnarkoba juga mengamankan dua pengguna di seputaran kota Singaraja. Keduanya yakni Nusrat Danan Jaya alias Dani,47, dan Richard Nashar alias Ricard,34, warga Jalan Hasanudin, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan/ Kabupaten Buleleng. Keduanya diamankan di lokasi yang berbeda dan masih dalam tahap pengembangan.

AKP Derawi yang didampingi Kasubag Humas Polres Buleleng Iptu Gede Sumarjaya mengatakan masih buntu dalam pengungkapan bandar yang menyuplai barang kepada kedua pelaku. "Pengakuan mereka sementara mengambil dnegan sistem tempe, tetapi tidak tahu siapa nama yang menjual barang kepada mereka," imbuh dia. Terhadap Cepot, Dani dan Ricard dikenakan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan Cak Lole ditetapkan sebagai pengedar, dikenakan pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun penjara.

Cak Lole saat dihadirkan di Mapolres Buleleng, mengaku sudah melakoni pekerjaan melawan hukum itu sejak 2 tahun belakangan. Hanya saja sejauh ini dirinya masih bungkam dan merahasiakan penyuplai barang yang diedarkannya. "Saya beli dan ambil tempelan di jalan Lovina-Seririt. Sekali antar dapat untung lima puluh ribu, karena faktor ekonomi saja," akunya yang bekerja serabutan. ☎ k23

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *TUA*

Rendah, Pendapatan dari Izin Tenaga Kerja Asing

SINGARAJA, NusaBali

Jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Buleleng terdeteksi 170 orang. Dari jumlah itu, sudah melunasi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) hingga Oktober 2019, sebanyak 35 orang dengan total nilai Rp 533.922.000. Perorang dikenakan retribusi IMTA USD 1.200, setara Rp 16.500.000, per tahun

Jumlah TKA yang telah memperpanjang IMTA hingga Oktober 2019, masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,5 miliar. Rendahnya realisasi IMTA, dipicu peralihan kewenangan yang semula dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, kini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Buleleng.

Kepala Dinas Perizinan Buleleng Putu Artawan, dikonfirmasi Selasa (15/10), tidak menampik penerimaan retribusi sektor IMTA masih minim.

Meski begitu, pihaknya yakin bakal mampu memenuhi target yang dibebankan. "Kalau target Rp 1,5 miliar itu, kita optimis tercapai. Kan masih ada sisa 65 orang pekerja asing yang belum memperpanjang izin sampai Desember mendatang. Karena ada naker yang membayar lewat pusat juga," katanya.

Menurutnya, terjadi transisi peralihan kewenangan pelayanan perizinan IMTA dari Disnaker ke Dinas PMPTSP Buleleng. Peralihan kewenangan terhitung mulai 2 Mei 2019 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 tahun 2018, tentang

pendelegasian kewenangan melakukan validasi pelayanan kewenangan perizinan dan non perizinan, khusus IMTA serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Praktis, pihak DPMPTSP Buleleng baru melakukan validasi retribusi IMTA setelah bulan Mei tersebut.

"Selama masa transisi (Januari-Mei) itu, kami tidak melakukan validasi retribusi IMTA. Pekerja asing langsung membayar IMTA ke pusat melalui sistem online. Data kami, TKA membayar ke pusat sekitar 36 orang, kalau dihitung sekitar Rp 594 juta," terangnya.

Ketika ditanya langkah dan upaya memaksimalkan pendapatan sektor IMTA, Kadis Artawan mengaku hanya mengandalkan sistem online TKA. "Kami mengandalkan sistem online, karena sifatnya kan hanya validasi data, bukan langsung turun melakukan pengawasan dan peringatan kepada TKA di Buleleng," ujarnya.

Rendahnya realisasi IMTA mendapat sorotan dari anggota Komisi III DPRD Buleleng, Wayan Masda. Karena jika dibandingkan capaian IMTA September 2018 lalu, pendapatan ini sudah melampaui target. Retribusi IMTA menyumbang Rp 1.873.724.000 dari target Rp 1.850.000.000, di tahun 2018. "Kami minta maksimalkan potensi PAD yang ada. Dinas Perizinan selaku leading sektor harus pro aktif melakukan penagihan dan teguran kepada setiap wajib retribusi IMTA," katanya. **k19**

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Jambret*

Residivis Jambret Kembali Beraksi

SINGARAJA, NusaBali

Rizki Teguh Prasetyo Putra Alias Teguh, 34, warga Perum Satelit Asri Utama, Nomor 5, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, kembali digulung polisi. Residivis jambret ini diamankan setelah melakukan aksi penjambretan di Jalan Gempol, Kelurahan Banyuning, Kecamatan/Kabupaten Buleleng pada Senin (7/10) pukul lalu, kepada seorang perempuan.

Aksinya terungkap saat korban penjambretan Made Temi Miliarti, 30, warga Banjar Dinas Sanih, Desa Pengelatan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng sedang melintas di jalan Gempol. Namun tiba-tiba saja korban yang saat itu mengendarai sepeda motor dipepet oleh pengendara motor lainnya dari sisi kiri. Tak berselang lama, dompet yang korban gantung di stang kiri langsung dijambret pelaku Teguh dan dibawa kabur.

Kapolsek Kota Singaraja AKP I Gusti Nyoman Yudistira seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, Selasa (15/10) kemarin, mengatakan atas laporan tersebut, Tim Unit Reskrim dip-



• NUSABALILULUK
Rizki, residivis jambret yang kembali berulah diamankan polisi, setelah beraksi di Jalan Gempol, Kelurahan Banyuning, Buleleng, sepekan yang lalu.

impin Iptu Ida Bagus Astawa, langsung melakukan penyelidikan. Hingga berselang lima hari pelaku mengarah kepada tersangka Teguh yang kesehariannya berjualan telur gulung di Jalan Ayani, Buleleng. "Pelaku kami amankan Sabtu, 12 Oktober, saat berjualan di Jalan A Yani. Kami amankan beserta barang bukti satu unit HP korban yang sudah diganti kartu

SIMnya," jelas AKP Yudistira.

Pelaku yang sempat mendekam di penjara di tahun 2016 dengan kasus yang sama, melancarkan aksinya seorang diri. Menurut AKP Yudistira yang didampingi Kasubag Humas Polres Buleleng, Iptu Gede Sumarjaya mengatakan pelaku melakukan aksinya dengan mensurvei korbannya terlebih dahulu. Setelah dirasa ada kesempatan target korban langsung

dibuntuti dan dieksekusi setelah ada kesempatan saat melaju di jalan raya.

Pelaku Teguh atas perbuatannya dikenakan pasal 365 KUHP ancaman hukuman 9 tahun Jo pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu pelaku Teguh yang dihadirkan di Mapolres Buleleng Selasa kemarin mengakui perbuatannya. Dia mengaku kembali melancarkan aksi kriminalnya karena aji mumpung saat melintas di jalan Gempol, Banyuning dan melihat kesempatan.

Hasil penjambretan dompet korban yang berisi uang tunai Rp 500.000, dia pakai untuk keperluan sehari-hari. HP korban juga dia pakai setelah diganti kartu SIMnya. Sedangkan surat berharga seperti KTP, SIM dan lainnya dibuang untuk menghilangkan jejak. "Tidak ada target, kemarin saya pas lewat saja di Banyuning. Uangnya saya pakai keperluan sehari-hari, barangnya (HP, red) masih ada saya pakai," ucap ayah tiga anak yang sudah pernah divonis enam bulan penjara itu. **k23**

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *sengketa tanah*

Pasca SP3-kan Kasus Sengketa Tanah

Kapolres Dilaporkan ke Propam

LSM Gema Nusantara menyebut Kapolres Suratno menyalahi kode etik kepolisian saat menanggapi pertanyaan masyarakat.

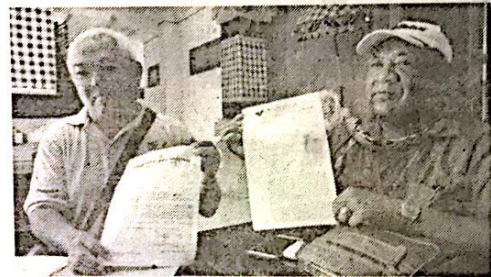
SINGARAJA, NusaBali

Kapolres Buleleng AKBP Suratno diadukan ke Bidang Propam Polda dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Pengaduan itu dilayangkan LSM Gema Nusantara atas kekecewaan masyarakat setelah Kapolres diduga melanggar kode etik kepolisian.

Perseteruan itu semakin menjadi saat Kapolres melayangkan SP3 (Penghentian Penyelidikan, Red) kasus sengketa tanah atas laporan tahun 2013. Dalam laporan itu, LSM Gema Nusantara menyebut Kapolres Suratno menyalahi kode etik kepolisian saat menanggapi per-

tanyaan masyarakat akan kejelasan kasus sengketa tanah yang dilaporkan almarhum Ong Bie Swan, warga Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan/Kabupaten Buleleng. Enam tahun lalu, pelapor Ong Bie Swan melaporkan dugaan penipuan pemecahan sertifikat tanah yang dilakukan iparnya Kang Siu Hong secara sepihak di Kantor Notaris yang beralamat di Jalan Kartini, Buleleng dan tak kunjung ada kejelasan.

Suami pelapor Tjhie Su Liong yang juga mantan anggota DPRD Buleleng tahun 2004 silam, dirinya mulai gerah saat mendapat respon yang kurang baik setelah menanyakan kejelasannya kasus beberapa bulan lalu. Bahkan enam tahun berjalan penanganan kasusnya masih jalan ditempat hingga pelapor Ong Bie Swan meninggal dunia tiga bulan yang lalu.



Tjhie Su Liong didampingi Ketua LSM Gema Nusantara Anton Kiabeni.

Namun, menurut Tjhie Su Liong pertanyaannya soal perkembangan penanganan kasus tersebut malah mendapat jawaban yang tak berkenan dihati dari Kapolres Buleleng, AKBP Suratno. "Di WA itu kapolres seolah menantang saya. Itu kekecewaan saya sebagai masyarakat. Sedangkan polisi itu kan pengayom masyarakat, itu yang saya sayangkan," ungkapnya saat ditemui di DPRD Buleleng, Selasa (15/10).

Atas sikap tersebut Tjhie Su Liong

melalui LSM Gema Nusantara melaporkan dugaan pelanggaran kode etik itu ke Bidang Propam dan Kopolnas pada Agustus 2019. Tak lama kemudian Kapolres Buleleng AKBP Suratno melayangkan SP3 atas kasus tersebut.

Sejauh ini pengaduan yang dilayangkan diklaim Tjhie Su Liong telah ditindaklanjuti Kopolnas lewat Surat nomor B-2247B/Kopolnas/9/2019. Dalam surat yang ditandatangani Anggota Kopolnas Yotje Mende itu, LSM Gema Nusantara diminta melaporkan dugaan tindakan pelanggaran etik itu pada Bidang Propam Polda Bali, berdasarkan fakta dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada.

Pihak Polres Buleleng belum memberikan tanggapan terkait pengaduan tersebut. Kasubbag Humas Polres Buleleng Iptu Gede Sumarjaya yang dikonfirmasi kemarin, belum bersedia berkomentar terkait pengaduan itu. "Kami belum dapat informasi dan pengaduannya. Nanti kami akan cek dulu, biar tidak keliru," ujar Kasubbag Iptu Sumarjaya. k23

Sub BAGIAN HUMAS D/

formasi BUPATEN BULELENG